

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM CAPAIAN PENILAIAN KINERJA AKSI KONVERGENSI STUNTING DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA STUNTING TAHUN 2023 DI PROVINSI LAMPUNG

Rahmiyanita Hakim

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
e-mail : rahmiyanita@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan penilaian kinerja aksi konvergensi stunting bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi stunting di Provinsi Lampung, menggunakan data dari SSGI 2022 dan SKI 2023. Stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang dihadapi di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung, dengan komitmen kuat untuk menurunkan prevalensi stunting, telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Lampung menurun secara signifikan dari 14,9% (SKI 2023) menjadi 4,6% (EPPGBM 2023). Kebijakan seperti Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pelaksanaan rembuk stunting, dan penetapan lokus desa stunting prioritas terbukti efektif. Namun, terdapat deviasi signifikan antara data SKI dan EPPGBM, yang menekankan pentingnya harmonisasi data untuk memastikan keakuratan. Rekomendasi utama mencakup harmonisasi data, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, optimalisasi anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting di Provinsi Lampung dan memberikan kontribusi nyata pada upaya nasional.

Kunci Kunci : Stunting, Kebijakan Pemerintah Daerah, 8 Aksi Konvergensi

ABSTRACT

The Lampung Provincial Government carried out a performance assessment of stunting convergence actions aimed at determining the effectiveness of local government policies in overcoming stunting in Lampung Province, using data from SSGI 2022 and SKI 2023. Stunting, a condition of failure to grow in children due to chronic malnutrition, is one of the main health problems faced in Lampung Province. Lampung Province, with its strong commitment to reducing the prevalence of stunting, has implemented various policies and program strategies. The research results show that the prevalence of stunting in Lampung Province has decreased significantly from 14.9% (SKI 2023) to 4.6% (EPPGBM 2023). Policies such as the Governor's Regulation regarding the Implementation of the Acceleration of Stunting Reduction, the formation of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), the implementation of stunting consultations, and the determination of priority stunting village loci have proven to be effective. However, there are significant deviations between SKI and EPPGBM data, which emphasizes the importance of data harmonization to ensure accuracy. The main recommendations include data harmonization, continuous monitoring and evaluation, increasing coordination and synergy between stakeholders, optimizing budgets, increasing human resource capacity, and public education. It is hoped that the implementation of these national recommendations can accelerate the reduction in stunting prevalence in Lampung Province and make a real contribution to these efforts.

Keywords: Stunting, Regional Government Policy, 8 Convergence Actions

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Stunting pada anak di bawah usia lima tahun berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan kognitif, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi di masa depan. Provinsi Lampung, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi masalah stunting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Lampung masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dasar hukum pelaksanaan stunting ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ Tahun 2018 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Kesehatan (Perpres 72 Tahun 2021).

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka stunting, termasuk program gizi seimbang, intervensi kesehatan ibu dan anak, serta kampanye edukasi gizi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi prevalensi stunting masih perlu dievaluasi secara komprehensif untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dan apa saja hambatan yang dihadapi. Penelitian sebelumnya telah banyak mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi stunting dan berbagai intervensi yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, penelitian oleh UNICEF (2018) menunjukkan bahwa intervensi gizi yang terintegrasi dengan program kesehatan ibu dan anak secara signifikan dapat menurunkan angka stunting. Studi lain oleh World Health Organization (WHO) (2019) menekankan pentingnya pendekatan multi-sektoral dalam penanganan stunting, yang mencakup peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan edukasi gizi (Akbar, M. F., Putubasai, E., & Asmaria, 2019).

Di Indonesia, beberapa penelitian telah mengkaji efektivitas program pemerintah dalam menurunkan stunting. Misalnya, penelitian oleh (Ratikasari et al., 2020) menyoroti keberhasilan program pemberian makanan tambahan (PMT) dalam menurunkan prevalensi stunting di beberapa daerah. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada pelaksanaan di tingkat lokal dan koordinasi antar sektor.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesenjangan dalam literatur yang berkaitan dengan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah secara spesifik di Provinsi Lampung. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada program atau intervensi tertentu tanpa mempertimbangkan kebijakan secara keseluruhan dan interaksi antara berbagai program. Selain itu, evaluasi kebijakan seringkali tidak memperhitungkan konteks lokal yang unik di Provinsi Lampung, seperti kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi dan hasil kebijakan (Ratikasari et al., 2020).

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu target utama

Pembangunan Daerah yang masuk ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung baik jangka menengah (RPJMD) 2019-2024 maupun tahunan (RKPD (Mastina & Mitra, 2023)). Hal ini tertuang dalam Agenda kerja Gubernur dan wakil Gubernur Lampung yaitu Lampung Sehat dengan melaksanakan aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting. Selaras dengan target Nasional, Provinsi Lampung juga memiliki target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 % di tahun 2024 (Fitrauni et al., 2022). Berdasarkan pencapaian penurunan prevalensi stunting terhadap capaian Nasional dan target tahun yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024, tampak bahwa Provinsi Lampung secara signifikan terus menunjukkan penurunan dan di tahun 2022 masuk 3 (Tiga) besar Provinsi dengan angka Prevalensi terendah secara Nasional (15,2%). Dilihat dari angka Prevalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 14,9, maka terdapat penurunan prevalensi stunting sebesar 0,3 persen dari capaian tahun 2022. Untuk mencapai 14 % ditahun 2024 maka

Provinsi Lampung diharapkan dapat berupaya lebih baik lagi (Wahyuningsih & Sedarmayanti, 2023).

Di bawah ini adalah grafik yang menggambarkan kecenderungan penurunan angka prevalensi stunting Provinsi Lampung sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 berdasarkan hasil Riskesdas dan SSGI.

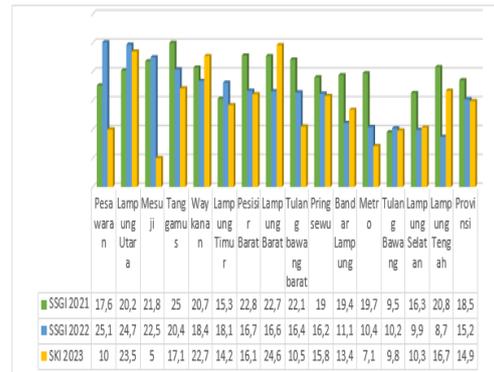
Gambar 1. Hasil Riskesdas dan SSGI



Sumber : data diolah

Namun jika data SSGI tahun 2022 dibandingkan dengan data EPPGBM 2023 menunjukkan adanya deviasi yang sangat signifikan. Angka prevalensi stunting Provinsi Lampung berdasarkan SSGI 2022 rata-rata sebesar 15,2%, sedangkan berdasarkan e-PPGBM 2023 sebesar 4,6%. Adapun data kasus prevalensi stunting berdasarkan SSGI Tahun 2022 dan data e-PPGBM 2023 dan per Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2. Grafik Riskesdas dan SSGI



Sumber : data diolah

Prevalensi stunting berdasarkan E-PPGBM:

Tabel 1. Prevalensi Stunting

Kabupaten/Kota	2022	2023
Kab Lampung Barat	6,65%	3,3%
Kab Tanggamus	3,23%	4,4%
Kab Lampung Selatan	3,60%	13,2%
Kab Lampung Timur	6,38%	12,4%
Kab Lampung Tengah	8,83%	8,9%
Kab Lampung Utara	7,34%	5,0%
Kab Way Kanan	7,12%	4,5%
Kab Tulangbawang	6,71%	8,3%
Kab Pesawaran	4,42%	10,1%
Kab Pringsenu	8,25%	9,8%
Kab Mesuji	11,66%	5,7%
Kab Tulang Bawang Barat	8,62%	2,7%
Kab Pesisir Barat	0,35%	0,5%
Kota Bandar Lampung	4,15%	1,5%
Kota Metro	8,87%	7,9%

Sumber : data diolah

Tabel di atas menunjukkan angka prevalensi stunting kabupaten tertinggi berdasarkan SKI 2023 berada di Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar 24.6% namun berdasarkan e-PPGBM justru relative lebih rendah yaitu 3.3%. Sedangkan angka prevalensi terendah berdasarkan SKI 2023 berada di Kabupaten Mesuji sebesar 5%, namun

berdasarkan e-PPGBM relative sama yaitu sebesar 5.7%. Angka prevalensi stunting tertinggi berdasarkan e-PPGBM 2023 berada di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 13,2%, namun berdasarkan SKI 2023 sebesar 10.3%. Sedangkan angka prevalensi terendah berdasarkan e-PPGBM 2023 berada di Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar 0.5%, namun berdasarkan SKI 2023 sebesar 16.1% (Nisa, 2019).

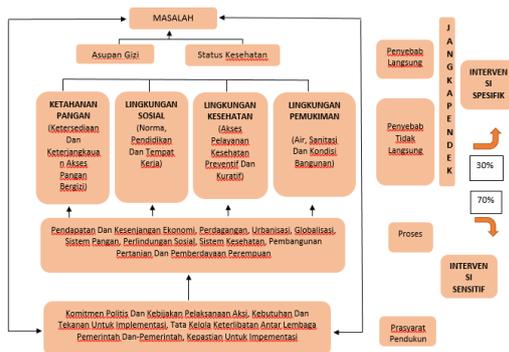
Rencana aksi penurunan stunting terintegrasi yang berhasil digalang di tingkat nasional, perlu didorong menjadi gerakan di tingkat akar rumput, sampai dengan di lapisan masyarakat terbawah yaitu di desa/kelurahan. Dengan demikian program Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana digagas oleh pemerintah Provinsi Lampung dapat membumi sampai di tataran operasional di pemerintahan desa/kelurahan.

Sumber data: diolah

Dari pohon masalah diatas terlihat bahwa kurang optimalnya pencegahan stunting berbasis intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum maksimalnya pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Selain itu bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mengurangi angka stunting. Oleh karena itu perlu disusun langkah strategis untuk mengatasi problematika pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting yang ada di Kabupaten Kota se-provinsi Lampung serta bagaimana koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Provinsi Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi stunting di Provinsi Lampung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan implementasi kebijakan penurunan stunting di masa mendatang.

Gambar 3. Pohon Masalah



Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Lampung dan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien.

Manfaat pada penelitian ini yaitu:

- a. Menjadi bahan kebijakan bagi Provinsi Lampung dalam upaya penurunan stunting dan penyelesaian penurunan stunting berdasarkan capaian penilaian kinerja aksi konvergensi stunting;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan apa yang dapat diterapkan di Provinsi Lampung dalam penanganan Stunting;
- c. Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi;
- d. Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional di Provinsi (Bappenas, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi Pustaka dan wawancara. Metode ini dilakukan untuk mencari literatur yang tepat dengan cara memahami dan mempelajari teori dari berbagai sumber literatur terkait yang berhubungan dengan artikel, melakukan wawancara dengan pihak terkait. Pengumpulan data dengan mencari beberapa sumber dan mengkonstruksi kembali data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah ada, selanjutnya dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif dan desain studi kasus atau *case research design* di Provinsi Lampung, Disamping itu juga dilakukan Kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Di Provinsi Lampung Tahun 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Stunting adalah masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berlangsung dalam jangka panjang (Veronika Frisda Anintya, 2023). Di Provinsi Lampung, penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu target utama pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024, serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi agenda kerja penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi stunting di Provinsi Lampung dengan membandingkan data prevalensi stunting dari dua sumber utama, yaitu EPPGBM 2023 dan SKI 2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dukungan kebijakan, program, dan anggaran yang telah disusun dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai target penurunan stunting.

Perkembangan capaian prevalensi stunting Provinsi Lampung Tahun

Tahun 2021 Lampung hanya masuk 5 (Lima) besar Provinsi dengan angka Prevalensi stunting terendah secara nasional. Tahun 2022 Lampung masuk 3 (Tiga) besar Provinsi dengan angka Pravalensi stunting terendah secara nasional, dilihat dari angka Pravalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 14,9, maka terdapat penurunan prevalensi stunting sebesar 0,3 persen dari capaian tahun 2022. Untuk mencapai 14 % ditahun 2024 maka Provinsi Lampung diharapkan dapat berupaya lebih baik lagi. Bila dilihat per Kabupaten/Kota tampak beberapa Kabupaten yang Prevalensi Stunting nya meningkat dari tahun sebelumnya (Way Kanan, Lampung Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah).

Upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam penurunan prevalensi stunting adalah dengan menetapkan pada masalah. Intervensi sensitif gizi ini seperti program peningkatan ekonomi keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), program pangan lestari, bedah rumah, akses air bersih dan sanitasi, meningkatkan kualitas SDM melalui edukasi gizi, dan juga pembangunan infrastruktur. Namun solusi tersebut belum sepenuhnya efektif mengingat

angka stunting yang semakin tahun kian melonjak pesat. Hal ini diasumsikan bahwa upaya diatas sebenarnya belum terfokus pada apa yang menjadi akar permasalahan. Selain itu, upaya pemerintah diatas seolah hanya menitik fokuskan pada upaya penanggulangan. Artinya upaya tersebut ada akibat dari munculnya permasalahan stunting lebih dahulu. Dalam 3 tahun terakhir, untuk Provinsi Lampung sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan hal ini terjadi karena komitmen para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Adapun hasil dari perencanaan yang telah dilaksanakan Pemerintah setempat dalam upaya penurunan stunting ada 8 Aksi yaitu:

1. Analisis Situasi
2. Rencana Program dan Kegiatan
3. Rembuk Stunting
4. Penyusunan Kebijakan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
6. Manajemen Data
7. Pengukuran dan Publikasi
8. Hasil Review Kinerja Tahunan (Picauly, 2021).

Kondisi kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan di Provinsi

Lampung juga mempengaruhi percepatan penurunan Stunting. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dalam kategori sedang (tahun 2023 sebesar 72,48%) menunjukkan kondisi produktifitas kerja penduduk yang mengakibatkan sulitnya mencari, mendapatkan bahkan menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran bertambah (data tahun 2023 adalah 4,23). Keadaan yang terus berulang akan menyebabkan permasalahan meningkatnya kemiskinan (tahun 2023 sebesar 11,11%) dan kemiskinan menyebabkan ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Word Bank, 2015), selain itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, didapat informasi bahwa Capaian Kegiatan Prioritas Tematik Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung belum dilakukan secara maksimal, diantaranya:

- a. Kegiatan Rembuk Stunting di 15 kabupaten/ kota hanya ada 15 kabupaten/kota (93%) yang menghasilkan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2024;

- b. Kegiatan Audit Kasus Stunting sudah dilaksanakan di 15 Kabupaten/kota (90%);
- c. Beberapa indikator spesifik kunci belum mencapai target, seperti ANC bagi bumil, PMT bumil KEK, Balita ditimbang, ASI Eksklusif dan Balita Imunisasi Dasar Lengkap.
- Intervensi untuk remaja (Skrining Anemia sebesar 89,5 % dan TTD Rematri sebesar 65,4%)
 - Intervensi untuk Bumil (ANS Bumil sebesar 78,3%, TTD Bumil sebesar 91,8%, PMT Bumil KEK sebesar 81,5%)
 - Intervensi Untuk Balita (Balita ditimbang sebesar 80,4%, ASI Eksklusif sebesar 75,6%, PMT Gizi Kurang sebesar 85,2%, Tata laksana Gizi Buruk sebesar 100%, Balita IDL sebesar 85,98)
 - Lintas Siklus (Desa Bebas BABS sebesar 85 %)
- d. Berdasarkan data SSGI 2022 dan SKI 2023 prevalensi stunting mengalami kenaikan pada usia 6 bulan ke 12 bulan dan 24 bulan.

Menunjukkan bahwa anak usia tersebut tidak mendapatkan intervensi yang mencukupi. Berdasarkan data dibawah ini bahwa masih banyak sasaran baduta dan kasus stunting yang ada di Provinsi Lampung (Juni, 2024).

Tabel 2. Kabupaten di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Sasaran 6- 23 bulan	Stunting	PK23
1.	KAB LAMPUNG BARAT	4.926	112	3.316
2.	KAB TANGGAMUS	7.718	283	8.432
3.	KAB LAMPUNG SELATAN	13.451	274	15.545
4.	KAB LAMPUNG TIMUR	16.560	441	9.105
5.	KAB LAMPUNG TENGAH	13.462	941	9.261
6.	KAB LAMPUNG UTARA	7.712	287	6.242
7.	KAB WAY KANAN	7.447	498	6.001
8.	KAB TULANGBAWANG	7.765	581	3.761
9.	KAB PESAWARAN	3.492	130	6.886
10.	KAB PRINGSEWU	7.606	385	6.318
11.	KAB MESUJI	4.197	325	2.711
12.	KAB TULANG BAWANG BARAT	4.254	169	3.302
13.	KAB PESISIR BARAT	1.442	7	1.621
14.	KOTA BANDAR LAMPUNG	15.364	118	8.830
15.	KOTA METRO	2.183	65	3.298
JUMLAH		117.579	4.616	94.624

Sumber data: diolah

Dengan banyaknya jumlah balita yang harus diintervensi maka harus adanya pemetaan dan program yang tersedia di kabupaten/kota untuk setiap intervensi gizi spesifik dan sensitif beserta sumber dan besaran pendanaannya. Adapun beberapa contoh program/kegiatan beserta pendanaannya yang termasuk dalam program pokok untuk intervensi gizi prioritas adalah:

- Program Kesehatan Ibu dan Anak; pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk intervensi kesehatan ibu hamil (intervensi gizi spesifik) yang didanai Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); PAUD untuk intervensi penyediaan akses pendidikan dasar untuk semua (intervensi gizi sensitif), yang didanai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD;
- Program Air Minum dan Sanitasi; program pengembangan jaringan air bersih untuk intervensi akses air minum yang aman (intervensi gizi sensitif), yang didanai APBD (Akbar et al., 2019).

Dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pencapaian target Prevalensi Stunting Nasional sebesar 14% dan 14,9% untuk Provinsi Lampung di tahun 2023, Provinsi Lampung terus membuat strategi dalam mendukung pelaksanaan 8 aksi konvergensi di Kabupaten/Kota dan menjalin Koordinasi, sinergi dan konvergensi antara multisektor terkait, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun target percepatan penurunan stunting Provinsi Lampung per Kabupaten/kota dari tahun 2023 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	SKI 2023	Target 2023	Target 2024
1	Lampung Barat	24,6	16.08	12.97
2	Tanggamanu	17,1	17.68	14.25
3	Lampung Selatan	10,3	11.53	9.30
4	Lampung Timur	14,2	10.87	8.79
5	Lampung Tengah	16,7	14.78	11.94
6	Lampung Utara	23,5	14.44	11.71
7	Way Kanan	22,7	14.64	11.81
8	Tulangbawang	9,8	7.86	7.00
9	Pesawaran	10	12.45	10.04
10	Pringsewu	15,8	13.50	10.91
11	Mesuji	5	15.57	12.60
12	Tulang Bayang Barat	10,5	15.72	12.71
13	Pesisir Barat	16,1	16.18	13.06
14	Kota Bandar Lampung	13,4	13.48	10.77
15	Kota Metro	7,1	13.84	11.11
	Lampung	14,9	13.45	10.88

Sumber: data diolah

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung.
- b. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/103/VI.01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2022-2024.

- c. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045-2/4683-1/VI-01/2022 tentang Pelaksanaan Rembuk Stunting di Provinsi Lampung.
- d. Penetapan Lokus Desa Stunting Prioritas, yang bertujuan untuk memprioritaskan sumber daya daerah agar tepat sasaran dalam upaya percepatan penurunan stunting di setiap kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah menyusun dan mengalokasikan anggaran dalam APBD. Pada tahun 2023, terdapat sedikitnya 31 kegiatan yang direncanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 162,070,466,782. Kegiatan ini mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang tersebar di berbagai OPD.

Kebijakan dan program yang telah diterapkan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting. Pembentukan TPPS, pelaksanaan rembuk stunting, dan penetapan lokus desa stunting prioritas merupakan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, efektivitas

kebijakan ini perlu terus dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pencapaian target 14% Prevalensi Stunting di tahun 2024 di Provinsi Lampung memerlukan kerjasama multisektor yang efektif, efisien dan harmonis. Untuk mendorong konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten/Kota, dapat menggunakan panduan 8 Aksi Integrasi. Pendampingan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari Aksi 1 (Analisis Situasi), Aksi 2 (Penyusunan Rencana Kerja), Aksi 3 (Rembuk Stunting Kabupaten/Kota), Aksi 4 (Perbup/Perwakli Tentang Peran Desa), Aksi 5 (Kader Pembangunan Manusia), Aksi 6 (Manajemen Data), Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi), dan Aksi 8 (Review Kinerja).

Percepatan penurunan stunting perlu akselerasi dan perubahan fundamental yang dilakukan dari hulu yakni kebijakan yang mengatur harus dilakukan mulai pra nikah, kehamilan, masa kehamilan dan masa interval

<https://doi.org/10.21580/ns.2020.4.2.4439>

VERONIKA FRISDA ANINTYA.
(2023). *KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PRINGSEWU*. 0, 1–23.

Wahyuningsih, T., & Sedarmayanti.
(2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangkalan. *Smia, Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik*, 253–262.

Widayatul Umam, M. (2023). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Pekalongan Skripsi*.